



Evaluasi Pembangunan Kabupaten Pidie berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Evaluation of the Development of Pidie Regency based on the Detailed Spatial Plan (RDTR)

[Studi Kasus Kecamatan Pidie]

Asri^{a,*}, Rinaldi Mirsa^a, Eri Saputra^a

^a Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh Indonesia

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Evaluation Planning Spatial Detail Construction Development</p>	<p>Detailed Spatial Plan (RDTR) is a planning document that regulates the spatial layout of an area which is more detailed and detailed than the Regional Spatial Plan (RTRW). This study aims to evaluate the development of Pidie Regency based on the Detailed Spatial Plan (RDTR) that has been prepared. Evaluation will be carried out on the implementation of the RDTR, development performance, and consistency between the development plan and the RDTR. The results of the study show that the implementation of the RDTR in Pidie Regency is still not optimal because there are several obstacles such as lack of coordination between related agencies, lack of community participation in the development planning process. In this case, synergy is needed between the local government and the community in implementing development plans to achieve the RDTR goals. In addition, periodic monitoring and evaluation must also be carried out by related parties to ensure successful implementation. Thus, the researcher hopes to provide useful information for related parties in making decisions related to development in Pidie Regency and increase understanding of the importance of Detailed Spatial Planning (RDTR) in regional development planning.</p>
Info artikel	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Evaluasi Perencanaan Detail Tata Ruang Pembangunan Pembangunan</p> <p>Received: 5 Juli 2023 Accepted: 13 Juli 2023 Published: 31 Juli 2023</p>	<p>Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang suatu wilayah yang lebih detail dan terperinci dibandingkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan Kabupaten Pidie berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun. Evaluasi akan dilakukan terhadap pelaksanaan RDTR, kinerja pembangunan, dan konsistensi antara rencana pembangunan dan RDTR. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan RDTR di Kabupaten Pidie masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala seperti kurangnya koordinasi antar dinas terkait, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam melaksanakan rencana pembangunan untuk mencapai tujuan RDTR. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala juga harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi. Dengan demikian, peneliti berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di Kabupaten Pidie dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Copyright ©2023 The Authors This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 International License</p> 

PENDAHULUAN

Secara keseluruhan, Kabupaten Pidie mengalami perkembangan pesat tanpa adanya penataan ruang yang tepat, yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat (Bahri, 2017). Oleh karena itu, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) penting untuk mengatur tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Penyusunan RDTR di Kabupaten Pidie melibatkan pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya, seperti minimnya akses pelayanan publik, minimnya pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan konflik antar daerah.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berperan dalam mengatur tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien. Namun pelaksanaan RDTR sering mengalami kendala seperti ketidaksesuaian dengan perkembangan daerah dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Evaluasi pembangunan Kabupaten Pidie berdasarkan RDTR penting dilakukan untuk mengukur kinerja dan efektivitas RDTR dalam mengatur tata ruang dan pembangunan daerah.

Evaluasi dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan RDTR dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Wijayanto, 2021). Dalam penyusunan RDTR di Kabupaten Pidie, fokus diberikan pada pengembangan pariwisata, pengelolaan sumber daya alam dan

* Corresponding authors | Asri | Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh Indonesia.

Alamat e-mail | asri.160160093@gmail.com



<https://doi.org/10.51179/rkt.v7i2.2118>



<http://www.journal.umuslim.ac.id/index.php/rkt>

Asri, A., Mirsa, R., Saputra, E. (2023). Evaluasi Pembangunan Kabupaten Pidie berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) [Studi Kasus Kecamatan Pidie]. *Jurnal Rekayasa Teknik dan Teknologi (Rekatek)*, 7(2), 91–96.

pembangunan infrastruktur. Aspek lingkungan dan kelestarian alam juga menjadi perhatian, dan partisipasi masyarakat diutamakan.

Evaluasi pembangunan di Kabupaten Pidie, termasuk di Kecamatan Pidie, penting dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. RDTR merupakan instrumen penting dalam pengaturan tata guna lahan di suatu kawasan, dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Peraturan RDTR di Kabupaten Pidie mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan RDTR di kecamatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan, memanfaatkan potensi alam dengan baik, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Evaluasi pelaksanaan RDTR di Kabupaten Pidie belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan di Kabupaten Pidie berdasarkan RDTR yang ada, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan dan dampak negatif serta merumuskan tindakan perbaikan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan terencana. Tony Addison adalah pakar ekonom pembangunan yang banyak menulis tentang isu-isu pembangunan, termasuk teori pembangunan. Salah satu kontribusinya terhadap teori pembangunan adalah melalui bukunya yang berjudul "From Conflict to Recovery in Africa" (2003) yang membahas tentang pembangunan pascakonflik. Menurut Addison, pembangunan pascakonflik tidak bisa diartikan secara sempit sebagai upaya pemulihan ekonomi pascakonflik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, politik, dan lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan peran masyarakat dalam proses pembangunan pascakonflik, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan peran kelompok perempuan dalam rekonstruksi pascakonflik.

Menurut Michael P. Todaro (2003) dalam bukunya yang berjudul "Economic Development", teori pembangunan merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan proses transformasi sosial ekonomi suatu masyarakat dari kondisi miskin dan terbelakang menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Todaro membagi teori pembangunan menjadi beberapa kelompok, antara lain teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pembangunan berkelanjutan. Teori modernisasi menekankan pentingnya mengikuti model pembangunan Barat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial (Hasan, 2018).

Teori ketergantungan menunjukkan bahwa negara berkembang harus menghindari ketergantungan pada negara maju untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial dalam proses pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan (Humaida, 2020).

Dapat disimpulkan secara keseluruhan, mempelajari teori pembangunan penting untuk memahami konsep, proses, dan hasil pembangunan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, teori-teori pembangunan yang telah dikemukakan oleh para ahli, strategi dan kebijakan pembangunan, dampak pembangunan, serta isu-isu kontemporer dalam pembangunan, dapat membantu kita untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses pembangunan, serta mengevaluasi strategi dan kebijakan pembangunan yang telah diterapkan di berbagai negara. Selain itu, mempelajari teori pembangunan juga dapat membantu kita untuk mengembangkan konsep pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan, serta merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggunakan data sekunder dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Perencanaan Daerah. Melalui analisis deskriptif, studi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan RDTR di Kabupaten Pidie, mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, dan menyajikan temuan-temuan secara rinci berdasarkan data sekunder yang tersedia. Hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas RDTR dalam mengelola rencana tata ruang dan pembangunan di Kabupaten Pidie, serta memberikan dasar untuk mengambil tindakan korektif yang tepat untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan. Teknik pengumpulan data ini meliputi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pembangunan di Kecamatan Pidie berdasarkan RDTR yang ada. Menganalisis sejauh mana RDTR telah diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Pidie, termasuk tingkat koordinasi antar dinas terkait dan partisipasi masyarakat.
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RDTR, seperti kurangnya koordinasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran daerah.
3. Menyajikan temuan mengenai sejauh mana RDTR telah berhasil mengatur tata ruang dan pembangunan di Kabupaten Pidie.
4. Menyoroti pentingnya RDTR dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pidie, termasuk pengembangan pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

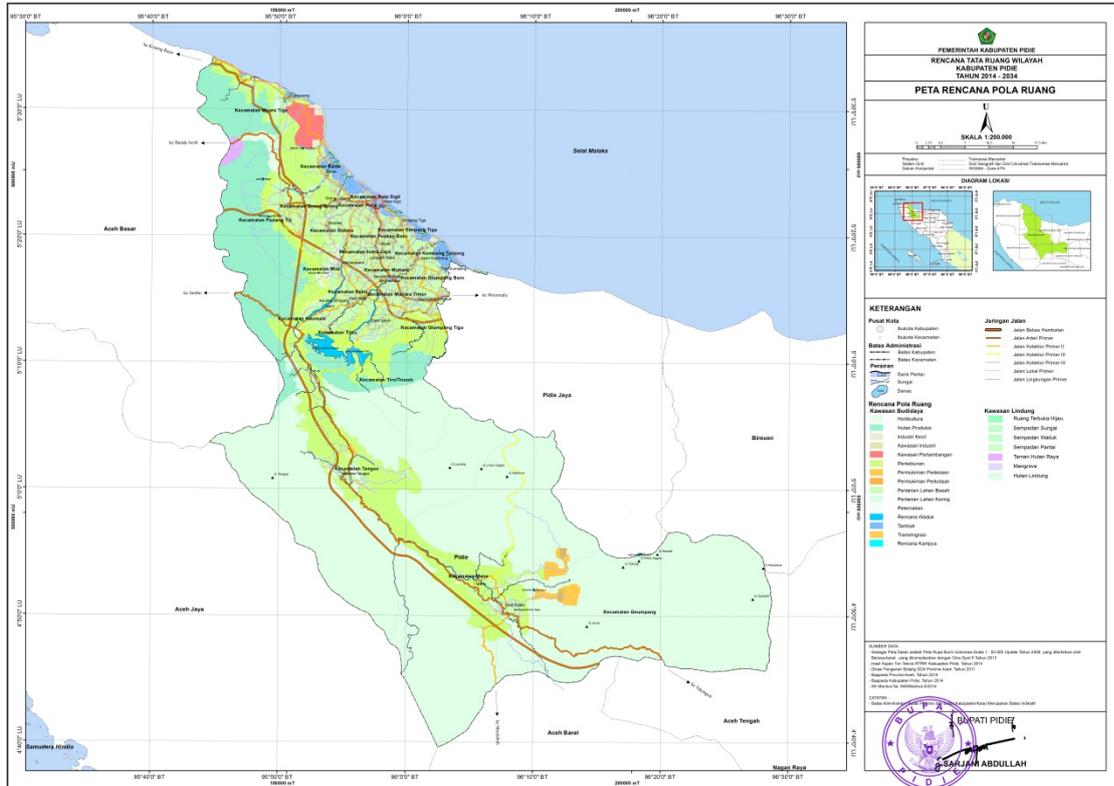
Evaluasi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan RDTR di Kecamatan Pidie, mengidentifikasi kelemahan dan dampak negatif yang perlu diperbaiki, dan memberikan dasar untuk mengambil tindakan perbaikan yang sesuai guna mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan. Data sekunder yang diperoleh dari Dinas PUPR Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Pidie digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis data yang obyektif, terinci, dan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pidie berada di bagian utara Provinsi Aceh, batas-batasnya ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi lahan seluas 318.444,77 Ha, yang terdiri dari 23 kecamatan, 94 pemukiman dan 731 gampong, laut teritorial wilayah sejauh 4 mil garis pangkal seluas 39.845,37 Ha, ruang udara di atas tanah dan laut di bawah tanah, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah tanah dan wilayah laut kewenangan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Pidie, seperti yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Batas-batas wilayah Kabupaten Pidie

Timur	Kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tengah dan Aceh Barat
Barat	Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya
Utara	Selat Malaka, Kabupaten Pidie Jaya dan Bireun
Selatan	Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Besar



Gambar 1. Peta Pola Ruang Kabupaten Pidie

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Pidie, salah satu kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh, sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Pidie tahun 2014-2034. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian tengah Kabupaten Pidie dengan ibu kota kecamatan Lhok Keutapang dan luas kecamatan 35 km². Batas-batas Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Batas-batas wilayah Kecamatan Pidie

Timur berbatasan dengan	Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Peukan Baro
Barat berbatasan dengan	Kecamatan Grong-Grong dan Kecamatan Bate
Utara berbatasan dengan	Kecamatan Kota Sigli dan Kecamatan Simpang Tiga
Selatan berbatasan dengan	Kecamatan Indrajaaya dan Kecamatan Peukan Baro

Lokasi penelitian memiliki beberapa desa/gampong yang dibatasi dalam satu kemukiman. Berikut adalah jumlah gampong dan luas dalam satu kemukiman yang ada di Kecamatan Pidie.

Tabel 3. Tabel Nama dan luas gampong menurut mukim dalam Kecamatan Pidie.

No.	Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (ha)
1	Gampong Lhang	Tijue	62
		Lampeudeu Tunong	20
		Puuk	65
		Lampeudeu Baroh	32
		Paya	31

		Mesjid Runtuh	21
		Baroh	31
		Dayah Teungoh	13
Luas Gampong Lhang			275
2	Keulibeut	Dayah Tanoh	10
		Cot Geunduk	42
		Tumpok Laweueng	60
		Ulee Ceue Keulibeut	40
		Keudee Keulibeut	40
		Ulee Tutue	15
		Dayah Tutong	40
Luas Gampong Keulibeut			247
3	Paloh	Labui	50
		Gampong	75
		Pulo Pisang	60
		Lamkuta	60
		Kampong Pukat	60
		Kampong Barat	60
		Paloh	50
Luas Mukim Paloh			415
4	Asan	Lampoh Lada	35
		Keuniree	65
		Tumpok 40	100
		Cot Teungoh	25
		Cot Rheng	62
Luas Mukim Asan			287
5	Kampong Baro	Kampong Baro	110
		Pulo Bubee	35
		Tibang	50
		Rawa	300
		Peukan Baro	50
		Mancang	100
		Gajah Ayee	111
		Lhok Keutapang	20
Luas Mukim Kampong Baro			776
6	Teubeng	Dalueng	75
		Ulee Ceue Teubeng	25
		Meucat	50
		Dayah Teubeng	100
		Tanjung Teubeng	25
		Jawa Teubeng	100
		Baya Teubeng	25
		Alaw Teubeng	100
Luas Mukim Teubeng			425
7	Sangeue	Keutapang Sangeue	26
		Krueng Dho	60
		Strong	60
		Keutumbu	35

		Jeumpa	100
		Raya Sangeue	100
		Jeuleupée	40
		Ujong Langgo	50
Luas Mukim Sangeu			471
8	Utue/Baloh	Cot Geulumpang	100
		Seuriweuk	50
		Mesjid Utue	50
		Leubeu	50
		Batee	35
		Raya Utue	50
		Seukumbrok	40
		Bie	50
		Blang Kuala	60
		Alue	35
		Seukee	24
		Paya Lintang	20
		Puli	40
Luas Mukim Utue/Baloh			604
Luas Kecamatan Pidie			3500

Penggunaan lahan di Kabupaten Pidie meliputi berbagai sektor, antara lain pertanian, perkebunan, pemukiman, dan sektor lainnya. Salah satu penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Pidie adalah pertanian, dimana lahan digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan, seperti padi, jagung, ubi kayu, dan sayuran.

Selain itu, lahan di Kabupaten Pidie juga dimanfaatkan untuk perkebunan, khususnya perkebunan kelapa dan kakau. Kedua jenis tanaman ini merupakan komoditas utama daerah dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Selain pertanian dan perkebunan, sebagian tanah di Kabupaten Pidie juga dialokasikan untuk pemukiman dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti jalan, sekolah dan fasilitas umum lainnya. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Pidie diupayakan secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertanian dan perlindungan lingkungan serta menjaga kualitas lahan agar tetap produktif dalam jangka panjang.

Pembangunan di Kecamatan Pidie telah menunjukkan beberapa kemajuan dan upaya di berbagai sektor. Berikut beberapa aspek yang dikaji untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan di Kecamatan Pidie:

1. Pusat Pemerintahan dan Perkantoran
2. Pusat Perekonomian dan Perdagangan
3. Kawasan Perumahan dan Pemukiman
4. Fasilitas Pendidikan
5. Fasilitas Kesehatan
6. Jalan/Lingkage
7. Pusat Pereindustrian
8. Pusat Peribadatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Kabupaten Pidie berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dan bagaimana pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diterapkan. Dari rangkaian hasil analisis dan pengamatan yang dilakukan tentang bagaimana perkembangan pembangunan Kabupaten Pidie berdasarkan Rencana Deetail Tata Ruang Kota (RDTR), ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan pembangunan di kabupaten Pidie, terutama pada rencana detail tata ruang di Kecamatan Pidie Berdasarkan 8 unsur pembentuk struktur ruang Kota Bireuen, terdapat unsur pembentuk struktur ruang yang mengalami perkembangan, ada yang tidak mengalami perkembangan dan ada pula yang tumbuh berkembang ke daerah di luar Kecamatan Pidie akan tetapi memberi dampak yang baik dalam perkembangan Struktur ruang kecamatan Pidie. Berikut unsur-unsur yang mengalami perkembangan, yang tidak mengalami perkembangan di Kecamatan Pidie.

Unsur-unsur yang mengalami perkembangan

1. Kawasan Perumahan dan Pemukiman
2. Kawasan Perekonomian dan Perdagangan
3. Fasilitas Pendidikan
4. Pusat Kesehatan
5. Jalan/Lingkage

Unsur-unsur yang tidak mengalami perkembangan

1. Pusat Pemerintahan dan perkantoran
2. Pusat Peribadatan
3. Kawasan Perindustrian

Dalam hal ini ketepatan pelaksanaan rencana rinci tata ruang di Kabupaten Pidie masih memerlukan perubahan dan pengembangan lebih lanjut. Dalam rangka keseimbangan pembangunan di Kabupaten Pidie agar penataan ruang tertata dengan baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil Evaluasi Pembangunan Kabupaten Pidie Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), terdapat beberapa variabel yang dijadikan acuan peneliti yaitu: Pusat Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Ekonomi dan Perdagangan, Kawasan Permukiman dan Perumahan, Kawasan Pendidikan, Sarana Kesehatan, Balai Ibadah, Sentra Industri dan terakhir Jalan/Keterkaitan. Hasil penelitian studi kasus ini, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara rencana detail tata ruang dengan hasil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, K. (2017). *Dampak Film Kartun Terhadap Tingkah Laku Anak (Studi pada Gampong Seukeum Bambong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 18(1), 131-154.*
- Micheal P. Tadaro & Stephen C. Smith (2003). *Economic Development*.
- Wijayanto, P. B., & Maryono, M. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(2), 168-182.*